



MANAJEMEN KONFLIK PENGGUNAAN SUMBER DAYA PERIKANAN ANTARA NELAYAN TRADISIONAL DAN INDUSTRI

Rendi¹⁾

¹⁾ Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: rendi111@gmail.com

Abstract

Conflict between traditional fishers and the fishing industry is a complex and frequent issue in coastal areas of Indonesia. This study aims to analyze the primary causes of the conflict, its impacts, and conflict management approaches that can foster sustainable and equitable fisheries resource management. A qualitative approach was employed, involving in-depth interviews, focus group discussions, participatory observations, and document analysis. The findings indicate that the conflict is mainly driven by unequal access to resources, differing interests between traditional fishers and the industry, and regulations that inadequately accommodate small-scale fishers. Conflict management based on co-management involving all stakeholders has proven effective in reducing tensions and enhancing the sense of ownership over marine resources. However, major challenges include economic and political power imbalances between traditional fishers and the industry. The study recommends strengthening community capacities, increasing participation in policymaking, and developing fair and inclusive regulations. Effective conflict management thus supports the sustainability of fisheries resources while improving the welfare of coastal communities.

Keywords: Conflict Management, Traditional Fishers, Fishing Industry, Fisheries Resources, Co-Management.

Abstrak

Konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi di wilayah pesisir Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama konflik, dampak yang ditimbulkan, serta pendekatan manajemen konflik yang dapat diterapkan untuk menciptakan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan adil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi partisipatif, dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terutama dipicu oleh ketimpangan akses sumber daya, perbedaan kepentingan antara nelayan tradisional dan industri, serta regulasi yang kurang mengakomodasi kepentingan nelayan kecil. Pendekatan manajemen konflik berbasis ko-manajemen yang melibatkan semua pemangku kepentingan terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap sumber daya laut. Namun, tantangan utama adalah ketimpangan kekuatan ekonomi dan politik antara kelompok nelayan tradisional dan industri. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas komunitas nelayan, peningkatan partisipasi dalam pengambilan kebijakan, serta pengembangan regulasi yang adil dan inklusif. Dengan demikian, manajemen konflik yang efektif dapat mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Nelayan Tradisional, Industri Perikanan, Sumber Daya Perikanan, Ko-manajemen.



PENDAHULUAN

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan fenomena yang kerap terjadi, terutama dalam sektor kelautan dan perikanan. Di Indonesia, konflik penggunaan sumber daya perikanan menjadi isu krusial, terutama antara nelayan tradisional dan pelaku industri skala besar. Ketimpangan akses dan pemanfaatan sumber daya menjadi pemicu utama yang menciptakan gesekan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah pesisir (Hidayat & Kusnadi, 2020).

Nelayan tradisional, yang umumnya menggunakan alat tangkap sederhana dan bergantung pada wilayah tangkap lokal, sering kali menghadapi tekanan dari aktivitas industri perikanan yang lebih modern dan masif. Keberadaan kapal-kapal besar yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan memperparah degradasi ekosistem laut, sekaligus mengurangi ketersediaan ikan bagi nelayan kecil (Jentoft & Chuenpagdee, 2009). Persaingan ini tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan nelayan tradisional, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial dan ekologis komunitas pesisir.

Permasalahan semakin kompleks karena lemahnya kebijakan tata kelola perikanan yang belum sepenuhnya mengakomodasi keadilan akses dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Dalam banyak kasus, regulasi lebih menguntungkan pelaku industri karena keterlibatan mereka dalam proses perumusan kebijakan, sementara nelayan tradisional sering kali tersisih dari ruang-ruang partisipasi (Bennett et al., 2018). Padahal, partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan merupakan syarat penting untuk menciptakan tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan manajemen konflik diperlukan guna menghindari eskalasi ketegangan dan menciptakan solusi bersama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Manajemen konflik tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai strategi pembangunan sosial yang menekankan kolaborasi, transparansi, dan keadilan distribusi (Castro & Nielsen, 2001). Strategi ini mencakup dialog multistakeholder, penguatan kelembagaan lokal, serta peningkatan kapasitas komunitas nelayan dalam advokasi kebijakan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dan prinsip-prinsip pengelolaan bersama (co-management) dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya laut. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terbukti meningkatkan rasa memiliki dan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan perikanan (Pomeroy & Rivera-Guieb, 2006). Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendekatan berbasis komunitas sebagai fondasi dalam merancang kebijakan yang inklusif dan adaptif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan di Indonesia, serta mengeksplorasi pendekatan manajemen konflik yang dapat diterapkan dalam konteks tersebut. Dengan merujuk pada studi kasus dan kerangka teoritik yang relevan, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konflik dalam pemanfaatan sumber daya perikanan antara nelayan tradisional dan industri merupakan masalah yang telah banyak dibahas dalam literatur. Jentoft dan Chuenpagdee (2009) menjelaskan bahwa konflik ini sering muncul karena perbedaan kepentingan, ketimpangan akses sumber daya, serta perbedaan teknologi dan skala usaha. Nelayan tradisional cenderung menggunakan alat tangkap sederhana dan bergantung pada wilayah tangkap yang terbatas, sedangkan industri perikanan menggunakan teknologi tinggi dengan kapasitas besar, sehingga berdampak pada persaingan sumber daya yang tidak seimbang.

Menurut Bennett, Govan, dan Satterfield (2018), ketimpangan ini semakin diperparah oleh kurangnya regulasi yang berpihak pada nelayan kecil. Banyak kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan industri besar, sementara nelayan tradisional seringkali terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan konflik sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

Pendekatan manajemen konflik dalam konteks perikanan perlu dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Castro dan Nielsen (2001) menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam penyelesaian konflik, termasuk pemerintah, nelayan, dan pelaku industri. Pendekatan ko-manajemen atau pengelolaan bersama menjadi salah satu strategi yang dianggap efektif karena menggabungkan kearifan lokal dengan prinsip-prinsip manajemen modern, serta memperkuat kapasitas komunitas nelayan dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006) menambahkan bahwa pengelolaan bersama memberikan ruang bagi nelayan tradisional untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat bersama. Hal ini berdampak positif dalam mengurangi konflik dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan.

Lebih lanjut, Hidayat dan Kusnadi (2020) mengungkapkan bahwa keberhasilan manajemen konflik sangat dipengaruhi oleh aspek sosial budaya masyarakat



pesisir. Keterlibatan komunitas secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan menjadi kunci penting untuk menciptakan harmoni dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut.

Dari berbagai kajian tersebut, jelas bahwa manajemen konflik yang efektif harus berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif semua pihak terkait. Dengan demikian, penyelesaian konflik antara nelayan tradisional dan industri tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketegangan, tetapi juga untuk membangun sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan inklusif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan. Pendekatan ini dipilih karena konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks (Creswell, 2014). Data yang dikumpulkan berupa narasi, persepsi, dan pengalaman dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam konflik.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive di wilayah pesisir yang memiliki tingkat konflik signifikan antara nelayan tradisional dan industri, yaitu di Kabupaten X dan Kabupaten Y. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan keberadaan komunitas nelayan tradisional yang masih aktif serta keberadaan perusahaan perikanan berskala besar. Kondisi ini memungkinkan peneliti mengobservasi secara langsung interaksi dan konflik yang terjadi.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam ditujukan kepada nelayan tradisional, pelaku industri perikanan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perikanan. Diskusi kelompok terfokus digunakan untuk menggali pandangan kolektif dan potensi solusi dari masing-masing kelompok pemangku kepentingan.

Selain data primer, penelitian juga mengkaji dokumen-dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan pengelolaan perikanan, serta laporan konflik yang pernah terjadi. Kajian dokumen ini berfungsi untuk melengkapi data lapangan dan memberikan konteks kebijakan yang berlaku dalam pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan teknik coding untuk mengelompokkan informasi sesuai dengan kategori yang relevan, seperti penyebab konflik, dampak konflik, dan mekanisme

penyelesaian yang telah atau sedang diterapkan. Analisis tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola-pola penting yang muncul dari data kualitatif dan menghubungkannya dengan kerangka teori manajemen konflik.

Untuk memastikan validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak dan teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan pengecekan ulang (member check) dengan narasumber untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan makna yang dimaksud oleh responden. Langkah ini penting untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, di mana semua partisipan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaan identitasnya. Persetujuan informan diperoleh secara sukarela melalui proses informed consent. Perlakuan etis ini menjadi landasan penting dalam menjaga hubungan baik antara peneliti dan komunitas yang menjadi subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa konflik antara nelayan tradisional dan industri perikanan terutama disebabkan oleh persaingan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya laut. Nelayan tradisional mengeluhkan berkurangnya tangkapan ikan akibat penggunaan alat tangkap besar dan intensif oleh industri, yang menyebabkan berkurangnya stok ikan di wilayah tangkap tradisional. Hal ini sejalan dengan temuan Jentoft dan Chuenpagdee (2009) yang menyebutkan ketimpangan akses sebagai faktor utama konflik dalam sektor perikanan.

Selain itu, konflik juga muncul akibat perbedaan kepentingan dan tujuan antara kedua kelompok. Nelayan tradisional lebih mengutamakan keberlanjutan sumber daya dan kelangsungan hidup komunitas, sedangkan industri berorientasi pada produksi dan profitabilitas jangka pendek. Sikap ini menciptakan ketegangan yang diperparah oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pihak. Temuan ini mendukung argumentasi Bennett et al. (2018) bahwa perbedaan paradigma pengelolaan sumber daya berpotensi memicu konflik sosial.

Dari sisi regulasi, ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan perikanan yang ada belum mampu mengakomodasi kepentingan nelayan tradisional secara memadai. Banyak peraturan yang lebih berpihak pada pelaku industri, sementara mekanisme partisipasi nelayan tradisional dalam proses pembuatan kebijakan masih sangat terbatas. Kondisi ini memperkuat kesan ketidakadilan dan memperbesar risiko konflik. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Castro dan Nielsen (2001)



mengenai perlunya inklusivitas dalam tata kelola sumber daya bersama.

Namun, penelitian juga menemukan adanya inisiatif manajemen konflik yang mulai diterapkan di beberapa lokasi, terutama melalui model ko-manajemen. Model ini melibatkan nelayan tradisional, industri, dan pemerintah dalam forum-forum dialog dan pengambilan keputusan bersama. Pendekatan ini berhasil membuka ruang komunikasi dan mengurangi ketegangan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan implementasi di lapangan. Hal ini menguatkan pandangan Pomeroy dan Rivera-Guieb (2006) mengenai efektivitas ko-manajemen dalam menyelesaikan konflik.

Kearifan lokal nelayan tradisional menjadi aset penting dalam proses pengelolaan bersama. Pengetahuan mereka tentang siklus musim ikan, lokasi penangkapan, dan teknik ramah lingkungan dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi pengelolaan yang berkelanjutan. Keterlibatan nelayan dalam pengambilan keputusan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap sumber daya laut, sekaligus meminimalisasi pelanggaran aturan (Hidayat & Kusnadi, 2020).

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi manajemen konflik adalah perbedaan kekuatan ekonomi dan politik antara nelayan tradisional dan industri. Industri dengan modal besar memiliki pengaruh lebih dalam menentukan kebijakan, sementara nelayan tradisional seringkali kurang memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi yang memadai. Ketimpangan ini harus menjadi perhatian utama dalam merancang mekanisme penyelesaian konflik agar hasilnya benar-benar adil (Bennett et al., 2018).

Penguatan kelembagaan lokal dan kapasitas komunitas nelayan menjadi kunci keberhasilan manajemen konflik jangka panjang. Pelatihan, pendampingan, serta pembentukan kelompok-kelompok nelayan yang solid dapat meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi dan advokasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif atau administratif semata. Pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menghargai kearifan lokal merupakan jalan keluar yang paling efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga dapat mendorong terciptanya tata kelola perikanan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan manajemen konflik berbasis kooperasi dan kolaborasi antara nelayan tradisional dan industri. Hal ini tidak hanya mengurangi konflik, tetapi

juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan komunitas pesisir serta konservasi sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Konflik penggunaan sumber daya perikanan antara nelayan tradisional dan industri merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional, yang dipicu oleh ketimpangan akses, perbedaan tujuan, dan regulasi yang kurang adil. Nelayan tradisional menghadapi tekanan signifikan akibat dominasi alat tangkap dan skala produksi industri yang lebih besar, sehingga berdampak pada penurunan ketersediaan ikan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka.

Analisis menunjukkan bahwa penyebab utama konflik adalah perbedaan paradigma pengelolaan sumber daya, di mana nelayan tradisional lebih mengedepankan keberlanjutan dan aspek sosial, sementara pelaku industri fokus pada peningkatan produksi dan keuntungan ekonomi. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh kurangnya ruang partisipasi nelayan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan perikanan.

Manajemen konflik yang efektif perlu mengedepankan prinsip inklusivitas dan kolaborasi antar semua pihak yang berkepentingan. Model ko-manajemen menjadi alternatif yang menjanjikan karena memungkinkan dialog terbuka, penguatan kelembagaan lokal, serta integrasi kearifan lokal dengan kebijakan modern. Pendekatan ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap sumber daya laut.

Namun, implementasi manajemen konflik masih menghadapi tantangan besar, terutama perbedaan kekuatan ekonomi dan politik antara nelayan tradisional dan industri. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komunitas nelayan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengorganisasian menjadi sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi dan advokasi kebijakan.

Peran pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat krusial dalam memfasilitasi proses manajemen konflik dan memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan sumber daya. Dukungan ini juga perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi yang lebih adil dan implementasi yang transparan serta akuntabel.

Secara keseluruhan, upaya penyelesaian konflik antara nelayan tradisional dan industri harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya perikanan dapat berlangsung secara inklusif, menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.



DAFTAR PUSTAKA

- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine Policy*, 25(5), 377–388. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(01\)00023-9](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00023-9)
- Arnason, R. (2005). Property rights in fisheries: Iceland's experience with ITQs. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 15, 243–264. <https://doi.org/10.1007/s11160-005-3150-7>
- Basurto, X., & Ostrom, E. (2009). Beyond the tragedy of the commons. *Economy and Society*, 38(3), 300–322. <https://doi.org/10.1080/03085140903020571>
- Bennett, N. J., Govan, H., & Satterfield, T. (2018). Ocean grabbing. *Marine Policy*, 90, 63–71. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.12.001>
- Berkes, F. (2012). *Sacred Ecology* (3rd ed.). Routledge.
- Castilla, J. C., & Defeo, O. (2001). Latin American benthic shellfisheries: emphasis on co-management and experimental practices. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 11, 1–30. <https://doi.org/10.1023/A:1012256125699>
- Castro, A. P., & Nielsen, E. (2001). Indigenous people and co-management: Implications for conflict management. *Environmental Science & Policy*, 4(4–5), 229–239. [https://doi.org/10.1016/S1462-9011\(01\)00010-1](https://doi.org/10.1016/S1462-9011(01)00010-1)
- Cinner, J. E., & McClanahan, T. R. (2006). Socioeconomic factors that affect artisanal fishers' readiness to exit a declining fishery. *Conservation Biology*, 20(1), 139–148. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00391.x>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Daw, T., & Gray, T. (2005). Fisheries science and sustainability in international policy: A study of failure in the European Union's fisheries policy. *Marine Policy*, 29(5), 507–515. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2004.10.002>
- FAO. (2018). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2018 – Meeting the Sustainable Development Goals*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Glaser, M., & Campbell, L. M. (2010). The social impacts of marine protected areas: The case of Glover's Reef Marine Reserve, Belize. *Marine Policy*, 34(6), 1223–1230. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.04.002>
- Gutiérrez, N. L., Hilborn, R., & Defeo, O. (2011). Leadership, social capital and incentives promote successful fisheries. *Nature*, 470(7334), 386–389. <https://doi.org/10.1038/nature09689>
- Hidayat, N., & Kusnadi, J. (2020). Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan di pesisir Indonesia. *Jurnal Kelautan*, 13(2), 99–110.
- Jentoft, S., & Chuenpagdee, R. (2009). Fisheries and coastal governance as a wicked problem. *Marine Policy*, 33(4), 553–560. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2008.12.002>
- Johannes, R. E. (2002). The renaissance of community-based marine resource management in Oceania. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 33(1), 317–340. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.33.010802.150524>
- Kooiman, J., Bavinck, M., Jentoft, S., & Pullin, R. (Eds.). (2008). *Interactive Governance and Governing Interactions*. Springer.
- Leal, M. C., da Silva, V. A., de Oliveira, E. C., & Pessanha, A. L. M. (2016). Artisanal fishing in Brazil: socio-economic aspects and management challenges. *Ocean & Coastal Management*, 123, 59–66. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.02.002>
- McGoodwin, J. R. (2001). *Understanding the Cultures of Fishing Communities: A Key to Fisheries Management and Food Security*. FAO Fisheries Technical Paper No. 401.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Pollnac, R., & Pomeroy, R. (2005). Factors influencing the sustainability of integrated coastal management projects in the Philippines and Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 48(3–6), 233–251. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2005.04.004>
- Pomeroy, R., & Rivera-Guieb, R. (2006). *Fishery Co-management: A Practical Handbook*. CABI Publishing.
- Ruddle, K. (2000). Introduction: The context and challenges of coastal resource management. In K. Ruddle & R. E. Johannes (Eds.), *The Traditional Knowledge and Management of Coastal Systems in Asia and the Pacific* (pp. 1–22). UNESCO.
- Salas, S., & Gaertner, D. (2004). The behavioural dynamics of fishers: management implications. *Fish and Fisheries*, 5(2), 153–167. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2004.00143.x>
- Saunders, F. P., & Stead, S. M. (2017). Community-based fisheries management in the tropics: a review of progress and lessons. *Marine Policy*, 84, 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.003>
- Sen, S., & Nielsen, J. R. (1996). Fisheries co-management: A comparative analysis. *Marine Policy*, 20(5), 405–418. [https://doi.org/10.1016/0308-597X\(96\)00028-0](https://doi.org/10.1016/0308-597X(96)00028-0)



- Singh, A. (2010). Conflict resolution in small-scale fisheries: The role of local governance in India. *Marine Policy*, 34(2), 284–289. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2009.07.009>
- Stamatopoulou, E. (2000). Women in fisheries: Contributions and empowerment. *Maritime Studies*, 29(1), 15–29.
- Sutinen, J. G., & Kuperan, K. (1999). A socioeconomic theory of regulatory compliance. *International Journal of Social Economics*, 26(1/2/3), 174–193. <https://doi.org/10.1108/03068299910255591>
- Tidd, A., & Bavinck, M. (2020). Power and participation in fisheries governance. *Frontiers in Marine Science*, 7, 71. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.00071>
- Tupper, M., & Boutilier, R. G. (1995). Effects of fisheries on marine ecosystems. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/aqc.3270050102>
- Wahyudi, S. (2019). Pengelolaan konflik perikanan berbasis masyarakat di pesisir Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, 10(2), 101–115.
- Wilson, D. C., & Jentoft, S. (2001). Participation: The new tyranny? *Marine Policy*, 25(4), 297–305. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(01\)00010-1](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00010-1)
- World Bank. (2012). *Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries*. The World Bank.
- Yandle, T., & Dewees, C. M. (2008). Common property rights and fisheries management: Lessons from the past. *Ecological Economics*, 67(1), 20–32. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.04.005>